

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi strategi penerapan akuntansi basis akrual pada sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan model kebutuhan dasar yang dikembangkan Ouda, pemerintah belum memiliki variabel yang mendasar untuk menyukseskan implementasi akuntansi basis akrual. Tanpa diikuti dengan perubahan manajemen, informasi akuntansi basis akrual akan menghasilkan *superfluous information* (terlalu banyak informasi) sehingga biaya yang timbul tidak dapat dipastikan, serta target yang ingin dicapai dari implementasi tidak dapat dipenuhi.
2. Dukungan lembaga eksekutif dan legislatif terlihat pada disahkannya paket kebijakan akuntansi dan pengelolaan keuangan negara, walaupun hal ini terkesan reaktif terhadap masalah-masalah yang timbul.
3. Strategi komunikasi yang dijalankan belum efektif dalam menyebarkan paket kebijakan ke tingkat daerah. Hal ini menyebabkan target waktu penerapan menjadi mundur dari yang sudah direncanakan, serta mengganggu proses percepatan reformasi birokrasi dan akuntansi secara keseluruhan. Hingga pelaporan untuk tahun anggaran 2006, Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2007 dari BPK menunjukkan masih ada daerah yang menggunakan peraturan-peraturan lama, seperti PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.
4. Implementasi teknologi informasi belum menyebar merata di daerah. Komputerisasi baru dilakukan pada daerah di zona industri, seperti Jawa Barat, Riau, Banjarmasin, dan Pontianak. Daerah seperti NTT, Maluku Utara, dan Papua belum memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk modernisasi sistem keuangannya.

5. Basis kas pada kebijakan akuntansi yang lama merupakan variabel yang penting untuk kesuksesan implementasi basis akrual. Pemerintah pusat dan daerah telah menerapkannya walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Administrasi Pemerintah dan RUU Pelayanan Publik sehingga reformasi birokrasi pemerintah bisa terwujud. Hal ini akan memudahkan implementasi basis akrual.
2. Penetapan kebijakan dan peraturan pemerintah harus dilakukan dengan perencanaan yang berkesinambungan sehingga target yang diharapkan bisa dirasakan dalam jangka panjang. Selama ini, kebijakan-kebijakan hanya berlaku efektif selama satu periode pemerintahan saja.
3. Pendidikan mengenai akuntansi pemerintahan sangat penting bagi kalangan birokrasi untuk menambah sumber daya manusia yang masih kurang. Kerjasama bisa dilakukan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta melalui program magang di instansi pemerintah, hingga seminar atau kuliah umum tentang akuntansi pemerintahan.
4. Menempatkan tim pengawasan di daerah akan sangat membantu pemerintah setempat mengimplementasi kebijakan akuntansi yang berlaku hingga jangka waktu yang ditentukan, sehingga komparabilitas bisa ditingkatkan di tingkat nasional. Hal ini akan memudahkan proses audit oleh BPK dan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
5. Menambahkan variabel *International Monitoring* (IM) kepada persamaan. IM bisa dilakukan dengan menyewa tenaga profesional dari International Accounting Standard Board (IASB) untuk mengawasi proses transisi menuju basis akrual yang dilakukan oleh pemerintah dalam periode waktu tertentu, sehingga proses menuju penerapan yang sesuai dengan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) bisa tercapai.